

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama kegiatan pembangunan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan penduduk, memberikan pemerataan pendapatan secara adil, memberikan kesempatan dan lapangan pekerjaan kepada masyarakat (Todaro, 2009). Jumlah Penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan keterbaruan teknologi. Dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan pengetahuan, akan meningkatkan permintaan produk dan layanan, namun jumlah penduduk yang meningkat tidak selalu berdampak baik untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sebaliknya, dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dapat menjadi faktor yang mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi (Desmawan et al., 2023).

Indonesia tergolong kategori negara dengan populasi terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang tinggi tidak selalu memberi jaminan kesuksesan pembangunan, sebaliknya bisa menjadi permasalahan untuk keberlangsungannya. Jika suatu negara dengan populasi yang sangat banyak namun tidak bisa menyeimbangkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sebagian besar penduduk yang berusia kerja tidak akan mendapatkan pekerjaan (Sulistiawati, 2013). Dengan penduduk usia kerja yang terus mengalami peningkatan ini akan meningkatkan jumlah pengangguran dan secara tidak langsung maka kemiskinan akan meningkat.

Badan Pusat Statistik (2020) pada sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa dan pada tahun 2022 penduduk berjumlah 275,77 juta, hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia didominasi oleh usia kerja atau penduduk usia produktif yaitu umur 15 tahun hingga 64 tahun yang mana ini termasuk penduduk angkatan kerja dan jumlah ini terus meningkat dihitung sejak 2018 sampai tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018-2022 tercatat bahwa di Indonesia pertumbuhan populasi terus mengalami peningkatan. Dengan penduduk tertinggi pada tahun 2022 mencapai 275.77 juta jiwa, pertumbuhan tertinggi terjadi antara tahun 2021-2022 sebanyak 3.09 juta jiwa dan pertumbuhan terendah pada tahun 2019-2020 sebanyak 2.12 juta jiwa. Agar tercapainya tujuan ekonomi maka perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk pengadaan lapangan pekerjaan yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 1.1 Data Angkatan Kerja Indonesia per Agustus Tahun 2018-2022

Tahun	Usia Produktif (15 tahun keatas)	Angkatan Kerja	Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
2018	198.126.553	133.355.571	7.037.385	5,30%
2019	201.185.014	135.859.695	7.104.424	5,23%
2020	203.972.460	138.221.938	9.767.754	7,07%
2021	206.708.299	140.152.575	9.102.052	6,49%
2022	209.420.383	143.722.644	8.425.931	5,86%

Sumber: (Data Dari Badan Pusat Statistik, 2022). Data diolah

Dari hasil data Badan Pusat Statistik (2022), populasi usia produktif di Indonesia meningkat setiap tahun, terhitung sejak 2018 sampai 2022 dengan jumlah tertinggi sebanyak 143.722.644. Di Indonesia angka pengangguran masih menunjukkan angka di atas 5 persen yang mana pada tahun 2019 sampai 2020 mencapai angka 7 persen, ini mengalami kenaikan hingga 1,8 persen. Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2022 berdasarkan data BPS menunjukkan penurunan dari Agustus 2021 sebesar 0,63 persen, namun angka pengangguran ini masih menunjukkan angka di atas 5 persen. Naiknya angka pengangguran di sebuah negara akan memberikan dampak pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara, naiknya pengangguran memberikan cerminan bahwa penyediaan lapangan pekerjaan penyerapan tenaga kerja tidak memadai untuk tenaga kerja yang tersedia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak 2016 pekerja sektor formal di Indonesia meningkat, di tahun 2018 sampai 2019 mencapai 43,12 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 4,59 persen. Terhitung sejak tahun 2009 hingga 2014 tenaga kerja sektor formal berjumlah 15,6 juta orang, jumlah ini mengalami penurunan hingga 8,5 juta orang dan mengalami kemerosotan pada tahun 2019 hingga sekarang 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada sektor informal, maka sektor informal masih mendominasi pekerjaan penduduk Indonesia yaitu mencapai 60,47 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dilansir dari berita resmi Badan Pusat Statistik, selama 15 tahun terakhir yaitu, 2009-2024 penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal Indonesia mengalami tren penurunan. Selama periode 2009-2014 penciptaan lapangan pekerjaan formal menyerap 15,6 juta orang pekerja dan mengalami penurunan 8,5 juta orang hingga 2019 dan ini terus menunjukkan kemerosotan angka, hal ini menunjukkan bahwa sulitnya untuk masuk ke sektor formal dan sedikitnya penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal (Badan Pusat Statistik, 2024). Nazara (2010) Selama bertahun-tahun, diketahui bahwa sektor informal terkait erat dengan kemiskinan disebabkan upah yang cenderung lebih rendah dibandingkan sektor formal, jam kerja tidak menentu serta tidak adanya jaminan sosial dan keselamatan kerja. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perlu diadakannya peralihan ke sektor formal dari informal.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh permintaan terhadap barang dan jasa meningkat sehingga mampu meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Keterbaharuan teknologi bisa mempengaruhi berkurangnya keterserapan tenaga kerja di beberapa sektor tapi dapat menambah perekrutan tenaga kerja di lain sektor (Filippi et al., 2023). Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih menjadi salah satu daya tarik bagi perusahaan di sektor formal. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri meningkatkan kemungkinan terserapnya tenaga kerja dalam sektor ini (K. B. Bonerri et al., 2018).

Pekerjaan pada sektor formal memiliki beberapa urgensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan sektor formal menawarkan gaji tetap dan memberikan manfaat asuransi kesehatan dan memberikan kestabilan finansial bagi para pekerja dan keluarga. Perlindungan pekerjaan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tentang jam kerja, upah minimum, dan kondisi kerja yang layak yang dapat mengurangi eksploitasi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja. Sektor formal sering menawarkan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja dan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pekerjaan di sektor formal berkontribusi pada penerimaan pajak negara, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pekerjaan formal dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok minoritas (Aleksynska et al., 2023).

Sulitnya untuk masuk sektor formal disebabkan karena sangat tingginya klasifikasi yang ditetapkan dan tidak memadainya kemampuan dan pendidikan yang dimiliki oleh pelamar kerja. Terhambatnya penyerapan tenaga kerja terjadi karena ada hal-hal yang mempengaruhi antara lain, kualitas sumber daya manusia yang memberikan pengaruh pada produktivitas kinerja. Setiap orang harus mendapatkan pendidikan yang tinggi, seiring meningkatnya pendidikan akan meningkatkan mutu sumber daya itu sendiri (Candra et al., 2019).

Tingkat pendidikan menentukan bagaimana mutu dari sumber daya manusia itu, tingkat pendidikan memberikan pengaruh pertimbangan dalam pemilihan tenaga kerja. Kualitas pendidikan penduduk Indonesia dapat dilihat dari seberapa lama dia menjalani pendidikan, semakin banyak penduduk dengan pendidikan tinggi maka akan membantu pendapatan penduduk karena mendukung produktivitas dan ekonomi sosial yang bertumbuh dengan baik (Putri et al., 2021). Pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas penduduk berdasarkan aturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan dan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengatur tentang penyelenggaraan, penjaminan mutu, dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia.

Penduduk yang berpendidikan lebih tinggi pada hakikatnya, akan menghasilkan individu yang lebih berkualitas di dunia pekerjaan dibanding dengan individu yang memiliki pendidikan rendah. Penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mempermudah berbaur individu tersebut berbaur di lingkungan pekerjaan dengan klasifikasi yang telah dia miliki selama berpendidikan (K. B. Bonerri et al., 2018). Menurut Rahmani & Groot (2023), pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan seseorang untuk bekerja. Sedangkan Prasetya (2021), mengemukakan penelitian dengan hasil berbeda bahwa dia mengatakan tingkat pendidikan tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Di Indonesia pendidikan tingkat Universitas terhitung Diploma ataupun Sarjana mengalami kenaikan setiap tahunnya namun peningkatan ini tidak signifikan, terlihat dari tahun 2019 hingga 2021 yang menamatkan pendidikan jenjang universitas hanya mengalami kenaikan secara berturut-turut 0,35 persen dan 0,31 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan melihat jumlah pengangguran di Indonesia yang masih menunjukkan angka di atas 5 persen pada tahun 2022, ini masih harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah terkait dengan jumlah pengangguran diantaranya dengan mengadakan kebijakan peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan yang baru yang tidak terlepas dari pengadaan investasi.

Proses pembangunan setiap negara termasuk Indonesia, dipengaruhi oleh investasi. Seperti pembukaan lapangan pekerjaan baru yang erat kaitannya dengan investasi swasta, banyak negara termasuk Indonesia yang mengandalkan investasi swasta untuk solusi masalah perekonomian negara, salah satunya ketenagakerjaan. Tentunya hal ini memberikan dampak positif seperti terjadinya peningkatan ketersediaan tenaga kerja di dalam negeri, meningkatnya penghasilan penduduk, *income per capita*, serta mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan (Muhammad & Ashar, 2022). Peningkatan pendapatan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan masyarakat karena investasi besar berdampak pada peluang untuk bekerja serta meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terutama pada sektor kerja formal. Di Indonesia investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Penelitian mengenai dampak investasi telah banyak dilakukan terhadap menyerap tenaga kerja sebelumnya oleh banyak peneliti tapi belum ditemukan hasil yang konsisten pada penelitian ini. Jude & Silaghi (2016) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa investasi tidak mempengaruhi permintaan tenaga kerja secara signifikan. Sedangkan menurut Muhammad & Ashar (2022) mengemukakan hasil penelitian dengan hasil bahwa investasi menunjukkan dampak positif serta signifikansi pada tingkat keterserapan tenaga kerja pada sektor formal di Indonesia.

Terhitung sejak 2016-2022 realisasi investasi di Indonesia mengalami kenaikan, terhitung pada tahun 2018 investasi di Indonesia mencapai Rp. 328604.9 Miliar Rupiah dan terus naik hingga tahun 2022 investasi Indonesia sebesar Rp. 552769.0 Miliar Rupiah. Dilihat dari kurs terkini dolar USD, penanaman investasi asing di Indonesia lebih banyak dibandingkan penanaman investasi dalam negeri. Berdasarkan Referensi No 01/ref.PKA/VI/2021 Perkembangan investasi domestik dan asing di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2017 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja oleh PMA lebih besar dibandingkan dengan PMDN. Sedangkan rentang waktu 2018-2020 penyerapan tenaga kerja pada PMDN lebih banyak dibandingkan penyerapan pada PMA (Luluk Zahara & Emillia Octavia, 2016).

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah guna membeli aset tetap dan lainnya, seperti tanah untuk pembangunan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peralatan, kesehatan, dan pendidikan (Basri & Tan, 2023). Dengan adanya fasilitas publik yang memadai dan maju akan memberikan rasa produktivitas yang tinggi pada masyarakat dalam bekerja, serta akan meningkatkan investasi masing-masing daerah dengan adanya pelayanan publik dan mempercepat proses pembangunan ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja terpenuhi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024). Pada penelitian ini belanja modal yang digunakan merupakan realisasi belanja modal di bidang pendidikan.

Menurut Keynes Investasi pemerintah yang sangat penting adalah distribusi belanja modal karena selain memberikan pengaruh terhadap peningkatan *income* melalui pelaksanaan program-program yang memanfaatkan sumber daya manusia, dapat memberi dampak tidak langsung pada pengembangan kegiatan perekonomian untuk perusahaan. Belanja modal di bidang pendidikan dapat memberikan efek multiplier pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Pada negara berkembang populasi usia kerja akan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini akan menimbulkan permasalahan apabila tidak ditangani dengan benar karena jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang tidak seimbang. Masalah ketenagakerjaan tidak terlepas dari faktor-faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya di latar belakang, maka penelitian ini akan membahas mengenai **"Peran Tingkat Pendidikan, Investasi dan Belanja Modal di Bidang Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia"**. Pada penelitian ini terdapat hubungan *endogenitas* antar sesama variabel independen yaitu variabel Tingkat Pendidikan (X1) dan variabel Belanja Modal Bidang Pendidikan (X3), maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Bidang Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor formal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Belanja Modal Bidang Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis yang diharapkan dan mengasah pemikiran dalam upaya pengaplikasian ilmu yang dipelajari.
2. Diharapkan penelitian ini menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca dan menjadi acuan pembelajaran.
3. Membantu penulis agar dapat menganalisis Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan, investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) dan belanja modal bidang pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Sektor Formal di Indonesia tahun 2016-2022.
4. Diharapkan informasi ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai penyempurna penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.